

JALAN BERLIKU MENUJU STABILITAS PANGAN: ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGENTASAN KEMISKINAN DI TINGKAT LOKAL

Oleh:

Ariel Aprianto¹

Olwa Deby Viola²

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Alamat: JL. Letnan Kolonel H Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Kec. Sukarame, Kota
Bandar Lampung, Lampung (35131).

Korespondensi Penulis: arilaprianto141@gmail.com, olwadebyv08@gmail.com

Abstract. *The issues of poverty and food instability are structural challenges that Indonesia still faces today. Although various government policies have been designed to ensure access and availability of food for the poor, their implementation at the local level often encounters complex obstacles. This study aims to analyze dynamics and obstacles in the implementation of poverty alleviation policies oriented towards food stability at the local level. Using a descriptive qualitative approach through case studies, this research highlights the deviation between the formal policy design (top-down) and implementation reality (bottom-up). The results show that the “winding road” in the policy implementation arose due to three main factors, namely structural (data and coordination), procedural (administrative inefficiency), and socio-political barriers (local interest intervention). This condition impacts on inaccurate targeting and delays in benefits for poor households, thereby hampering the goal of food stability. This research emphasizes the need to improve data integrity,*

JALAN BERLIKU MENUJU STABILITAS PANGAN: ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGENTASAN KEMISKINAN DI TINGKAT LOKAL

increaselocal accountability, as well as cross-actor collaboration as the main prerequisites tothe achievement of inclusive and sustainable food security.

Keywords: *Food Security, Poverty Alleviation, Policy Implementation, Local Governance, Economic Stability.*

Abstrak. Isu kemiskinan dan ketidakstabilan pangan merupakan tantangan struktural yang masih dihadapi Indonesia hingga kini. Meskipun berbagai kebijakan pemerintah telah dirancang untuk menjamin akses dan ketersediaan pangan bagi masyarakat miskin, implementasinya di tingkat lokal kerap menemui hambatan yang kompleks. Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika dan hambatan implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan yang berorientasi pada stabilitas pangan di tingkat daerah. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi kasus, penelitian ini menyoroti deviasi antara rancangan kebijakan formal (*top-down*) dengan realitas implementasi (*bottom-up*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa “jalan berliku” dalam pelaksanaan kebijakan muncul karena tiga faktor utama, yaitu hambatan struktural (data dan koordinasi), prosedural/birokrasi (inefisiensi administrasi), dan sosial-politik (intervensi kepentingan lokal). Kondisi ini berdampak pada ketidaktepatan sasaran dan keterlambatan manfaat bagi rumah tangga miskin, sehingga menghambat tujuan stabilitas pangan nasional. Penelitian ini menekankan perlunya perbaikan integritas data, peningkatan akuntabilitas lokal, serta kolaborasi lintas aktor sebagai prasyarat utama tercapainya ketahanan pangan yang inklusif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Ketahanan Pangan, Pengentasan Kemiskinan, Implementasi Kebijakan, Governance Lokal, Stabilitas Ekonomi.

LATAR BELAKANG

Isu kemiskinan dan ketidakstabilan pangan tetap menjadi tantangan struktural yang mendesak di Indonesia. Data menunjukkan bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi terjadi, kerentanan rumah tangga terhadap guncangan harga pangan dan ketidakcukupan gizi masih tinggi, terutama di daerah pedesaan dan terpencil (Ramdani & Murwiati, 2023; Ronalia et al., 2023). Dalam konteks ini, kebijakan pemerintah baik nasional maupun daerah memainkan peran krusial sebagai intervensi utama untuk menjamin akses, ketersediaan, dan pemanfaatan pangan yang merata, serta sebagai instrumen pengentasan

kemiskinan (Indah P. N. & Setyaningsih, 2020). Berbagai program telah diluncurkan, mulai dari skema bantuan sosial hingga program peningkatan produksi pertanian dan diversifikasi pangan lokal (Rusliyadi, 2024; Aulia, 2024).

Namun, pernyataan masalah mendasar yang dihadapi adalah: Mengapa, meskipun terdapat kerangka kebijakan yang jelas dan alokasi sumber daya seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) (Meliala & Djamaluddin, 2024), target stabilitas pangan seringkali tidak tercapai sepenuhnya, terutama di tingkat implementasi lokal? Literatur menunjukkan bahwa efektivitas program sering terhambat oleh masalah implementasi di lapangan, termasuk kapasitas birokrasi, fragmentasi kelembagaan, dan karakteristik sosio-ekonomi spesifik wilayah (Lukum & Yunus, 2023; Selvia & Widyastuti, 2024).

Penelitian ini memfokuskan analisis pada interaksi antara kebijakan pengentasan kemiskinan dan stabilitas pangan, mencakup program-program spesifik seperti Program Bantuan Pangan (seperti Raskin/BPNT/SPHP) yang bertujuan mengurangi beban ekonomi rumah tangga miskin, dan skema subsidi pertanian atau program diversifikasi pangan lokal yang berorientasi pada peningkatan ketahanan produksi (Mustofa et al., 2023; Wahyuni & Shaliza, 2022).

Tingkat lokal (Kabupaten/Kota/Kecamatan) dipilih sebagai fokus analisis utama karena ia merupakan titik kritis di mana kebijakan "bertemu" dengan realitas sosial, infrastruktur, dan kendala sumber daya. Keberhasilan atau kegagalan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh desain di tingkat pusat (*top-down*), tetapi juga oleh kemampuan adaptasi dan interpretasi kebijakan oleh aktor-aktor di lapangan (*bottom-up*), termasuk aparat desa dan birokrat lokal (Mohamad Nurpahdi et al., 2024). Tantangan seperti konversi lahan, kerusakan irigasi, stagnasi teknologi lokal (Husen et al., 2022), hingga keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran daerah (Selvia & Widyastuti, 2024), semuanya beroperasi di tingkat lokal.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah menganalisis hambatan dan dinamika implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan yang relevan dengan stabilitas pangan di lokasi studi. Sementara itu, tujuan spesifik penelitian ini meliputi: Mengidentifikasi faktor-faktor kontekstual dan struktural, seperti dinamika sosial-politik lokal dan kapasitas birokrasi, yang menciptakan "jalan berliku" (*deviations, policy gap*, tantangan birokrasi) di lapangan. Memetakan bagaimana optimalisasi sumber daya lokal dan

JALAN BERLIKU MENUJU STABILITAS PANGAN: ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGENTASAN KEMISKINAN DI TINGKAT LOKAL

kolaborasi pemangku kepentingan (Nugroho et al., 2025; Sari & Uwi'ah, 2024) dapat digunakan untuk menjembatani kesenjangan implementasi tersebut.

Penelitian ini berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan kunci sebagai berikut: Bagaimana kebijakan pengentasan kemiskinan/pangan diinterpretasikan dan diimplementasikan oleh aktor lokal, termasuk birokrat daerah dan aparat desa?, Apa saja hambatan utama yang dihadapi dalam proses implementasi kebijakan stabilitas pangan di tingkat lokal?, Bagaimana "jalan berliku" dan kesenjangan implementasi ini memengaruhi hasil akhir (*outcome*) stabilitas pangan rumah tangga dan efektivitas program pengentasan kemiskinan?

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi ganda, baik secara teoritis maupun praktis. Secara Teoritis: Penelitian ini akan memberikan bukti empiris yang kaya tentang model implementasi kebijakan yang kompleks (*bottom-up vs top-down*) dalam konteks multidimensi kemiskinan dan ketahanan pangan. Hasilnya diharapkan memperkaya studi tata kelola kolaboratif (*collaborative governance*) di tingkat lokal, sebagaimana ditekankan oleh Nugroho et al. (2025), dengan menunjukkan bagaimana mekanisme kolaborasi bekerja dalam menghadapi kendala spesifik daerah. Secara Praktis: Penelitian ini akan memberikan rekomendasi yang spesifik dan berbasis konteks kepada pemerintah daerah dan lembaga implementasi (seperti Dinas Ketahanan Pangan). Rekomendasi tersebut bertujuan untuk menyederhanakan, mengefektifkan jalur implementasi kebijakan, dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal untuk pengentasan kemiskinan yang lebih adaptif (Jufri et al., 2024; Sasana & Muid, 2025).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif deskriptif, dengan desain studi kasus terfokus (*focused case study*), yang bertujuan untuk memahami secara mendalam proses implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan dalam konteks stabilitas pangan di tingkat lokal. Pendekatan kualitatif dipilih karena efektif dalam mengidentifikasi 'jalan berliku' atau titik kritis yang bersifat non-linier, seperti hambatan struktural, birokrasi, dan sosial-politik yang muncul dari interaksi kompleks antara implementor dan penerima manfaat di lapangan. Sesuai dengan fokus pembahasan mengenai deviasi dan adaptasi kebijakan, metode ini memungkinkan analisis kritis terhadap kesenjangan antara kebijakan formal (*top-down*) yang dirancang di pusat dan realitas implementasi (*bottom-*

up) di wilayah studi. Lokasi penelitian dipilih secara purposive (bertujuan) di wilayah yang menjadi arena implementasi program bantuan pangan intensif dan menghadapi tantangan ketahanan pangan yang signifikan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan berbagai informan kunci, termasuk aparat implementor lokal (tingkat desa/kelurahan dan dinas terkait), pihak penyalur program, serta penerima manfaat langsung, yang narasi pengalamannya menjadi fokus utama analisis dampak. Data sekunder mencakup penelusuran dokumen resmi kebijakan, laporan implementasi program di tingkat daerah, serta tinjauan literatur ekstensif yang relevan dari studi kebijakan pangan dan kemiskinan di Indonesia. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif deskriptif, meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Temuan lapangan kemudian diinterpretasikan dan dihubungkan secara kritis dengan Teori Implementasi, untuk menganalisis secara tepat sejauh mana adaptasi lokal berfungsi sebagai inovasi positif atau justru distorsi yang merugikan efektivitas program.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Formal vs. Realitas Lokal

Kebijakan pengentasan kemiskinan, seperti penyaluran Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) atau program sejenis, secara formal didesain sebagai intervensi *top-down* yang bertujuan untuk memastikan ketersediaan dan akses pangan bagi Rumah Tangga Miskin (RTM), sebagaimana ditekankan dalam analisis Audi Rahmatika, Nuraini Dwiyanti, & Atikah Nurul Huda (2022) mengenai dampak kebijakan pemerintah terhadap ketimpangan pangan. Selain itu, transfer dana pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) di sektor pertanian juga secara eksplisit diarahkan untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam mencapai ketahanan pangan, sebuah mekanisme yang diteliti oleh Meliala & Djamaluddin (2024).

Namun, temuan di lokasi studi menunjukkan adanya deviasi signifikan antara rancangan formal dan implementasi di lapangan. Aparat lokal, terutama di tingkat desa/kelurahan, sering kali melakukan interpretasi atau adaptasi kebijakan. Misalnya, Firdasari & Hardjati (2023) mencatat bahwa implementasi program pangan di wilayah pedesaan sering disesuaikan dengan ketersediaan infrastruktur dan kondisi sosial

JALAN BERLIKU MENUJU STABILITAS PANGAN: ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGENTASAN KEMISKINAN DI TINGKAT LOKAL

setempat. Interpretasi ini dapat termanifestasi dalam penambahan kriteria penerima manfaat, perubahan jadwal penyaluran, atau bahkan substitusi jenis komoditas pangan yang disalurkan untuk menyesuaikan dengan ketersediaan lokal atau dinamika sosial. Adaptasi ini mencerminkan upaya implementor lokal untuk membuat kebijakan "bekerja" dalam konteks keterbatasan sumber daya dan konflik kepentingan, seperti yang diamati pada adaptasi program Raskin (Simbolon & Shylendra, 2022).

Titik Kritis "Jalan Berliku" (The Bottlenecks)

Implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan yang ditujukan untuk meningkatkan stabilitas pangan menghadapi serangkaian hambatan yang menjadi titik kritis atau 'jalan berliku' utama. Hambatan-hambatan ini dapat diklasifikasikan menjadi struktural, prosedural/birokrasi, dan sosial-politik.

Hambatan Struktural

Hambatan struktural didominasi oleh masalah data, koordinasi, dan anggaran. Akurasi data target penerima menjadi masalah kronis. Meskipun pemerintah pusat telah berupaya memperbaiki Basis Data Terpadu (BDT), Rianto (2022) menemukan bahwa program bantuan sosial pangan masih belum sepenuhnya efektif karena masalah ketidaktepatan sasaran. Selanjutnya, koordinasi antar-lembaga di tingkat daerah antara Dinas Sosial, Dinas Pangan, dan pihak penyalur (seperti perbankan atau PT. Food Station Tjipinang Jaya yang dikaji Dalimunthe, 2023-2024) seringkali terputus. Terakhir, alokasi anggaran yang tidak memadai atau keterlambatan transfer DAK yang dibahas Meliala & Djamaluddin (2024) seringkali membatasi kemampuan pemerintah daerah untuk melakukan intervensi pangan yang komprehensif atau memperkuat inovasi kebijakan seperti yang dicontohkan di Bandung (Simanjuntak et al., 2022-2023). Priambodo & Djirimu (2024) juga menyoroti bahwa strategi intervensi pemerintah daerah terhadap kemiskinan sangat dipengaruhi oleh kapasitas fiskal regional.

Hambatan Prosedural/Birokrasi

Titik kritis ini berkaitan dengan inefisiensi dalam proses administrasi. Proses penyaluran yang panjang dan persyaratan administrasi yang rumit menciptakan jeda waktu (lag time) antara penetapan kebijakan dan penerimaan manfaat. Di masa krisis seperti pandemi COVID-19, Larasati (2021) dan Keumala et al. (2021) menunjukkan

bahwa birokrasi yang lambat menjadi penghalang vital bagi respons kebijakan pangan yang cepat. Selain itu, sosialisasi yang lemah mengenai mekanisme pengambilan dan hak penerima manfaat juga ditemukan menjadi kendala umum di tingkat implementasi kebijakan.

Hambatan Sosial-Politik

Hambatan ini muncul dari interaksi kekuasaan dan kepentingan di tingkat lokal. Intervensi kepentingan lokal dan bias dalam pemilihan penerima (nepotisme atau politisasi bantuan) menyebabkan distorsi alokasi yang merugikan RTM yang paling membutuhkan, sesuai dengan temuan Rusli et al. (2025) mengenai strategi pengentasan kemiskinan berbasis ketahanan pangan di tingkat regional. Warsono & Agustina (2024) juga menggarisbawahi tantangan dalam mewujudkan desa bebas kelaparan yang terhambat oleh resistensi dan dinamika kekuasaan lokal. Hal ini menghasilkan resistensi masyarakat dari kelompok yang merasa dirugikan, baik RTM yang tidak terdaftar (disebut exclusion error) maupun masyarakat umum yang menilai program tidak adil.

Dampak Hambatan terhadap Stabilitas Pangan

Hambatan implementasi yang teridentifikasi dalam 'jalan berliku' ini memiliki dampak langsung dan merugikan terhadap empat pilar utama stabilitas pangan: ketersediaan, akses, pemanfaatan, dan stabilitas pasokan (Rahakbauw & Samputra, 2025).

1. Analisis Dampak

Setiap hambatan struktural, prosedural, dan sosial-politik secara kolektif menunda dan mengurangi manfaat program. Hambatan prosedural, misalnya, menyebabkan penyaluran terlambat, yang dalam konteks ketahanan pangan, berarti RTM tidak memiliki akses ke sumber daya saat mereka paling rentan (misalnya, di akhir bulan atau saat volatilitas harga meningkat). Hambatan struktural, terutama masalah data, menyebabkan target tidak tepat sasaran (tingginya exclusion dan inclusion error), sehingga sumber daya pangan terdistribusi pada rumah tangga yang tidak dikategorikan miskin, sementara kelompok rentan tetap lapar. Kondisi ini memperparah ketimpangan akses pangan yang diulas oleh Audi Rahmatika et al. (2022).

JALAN BERLIKU MENUJU STABILITAS PANGAN: ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGENTASAN KEMISKINAN DI TINGKAT LOKAL

2. Kisah Naratif Penerima Manfaat

Kisah Ibu Siti, seorang buruh tani harian di Desa X, menggambarkan dampak nyata dari 'jalan berliku' ini. Ia melaporkan, "Bantuan harusnya datang tanggal 5, tapi baru datang tanggal 20 karena katanya ada masalah di kabupaten. beras itu hanya cukup untuk 10 hari, jadi 15 hari sisanya kami hutang lagi di warung. Saya tahu banyak tetangga yang lebih mampu dari saya tapi dapat bantuan, sementara saya tidak. Jadi, uang BPNT itu hanya menutupi hutang lama, bukan menstabilkan makan kami." Kisah ini merefleksikan bagaimana penundaan birokrasi (prosedural) dan inclusion error (sosial-politik) secara langsung menggagalkan tujuan program untuk menciptakan stabilitas dan kemandirian pangan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan menuju stabilitas pangan di tingkat lokal melalui "Jalan Berliku" (The Bottlenecks) karena adanya deviasi signifikan antara kebijakan formal (*top-down*) dan realitas implementasi (*bottom-up*). Titik kritis utama ditemukan pada tiga ranah: (1) Struktural, berupa masalah akut akurasi data penerima dan koordinasi antar-lembaga, (2) Prosedural/Birokrasi, yang menyebabkan penyaluran terlambat, dan (3) Sosial-Politik, di mana intervensi kepentingan lokal dan bias pemilihan penerima menjadi distorsi yang merugikan. Distorsi ini secara langsung menyebabkan ketidaktepatan sasaran dan penundaan manfaat, sebagaimana digambarkan dalam narasi penerima manfaat, yang pada akhirnya menggagalkan tujuan program untuk menjamin stabilitas akses pangan bagi Rumah Tangga Miskin (RTM), serta memperparah ketimpangan yang ada.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, penelitian ini menyarankan tiga hal: pertama, perlunya investasi prioritas pada perbaikan integritas data terpadu untuk meminimalkan exclusion dan inclusion error; kedua, penguatan akuntabilitas implementor lokal untuk menekan distorsi sosial-politik; dan ketiga, mendorong adaptasi positif dengan optimalisasi sumber daya lokal dan sistem pertanian berkelanjutan serta inovasi kebijakan di tingkat daerah. Implikasi teoritisnya adalah bahwa efektivitas implementasi sangat bergantung pada mekanisme *bottom-up*, menegaskan bahwa stabilitas pangan yang berkelanjutan tidak dapat dicapai hanya dengan transfer dana atau bantuan jangka pendek,

melainkan melalui penguatan kapasitas dan kemandirian institusional dan masyarakat lokal dalam mengelola sumber daya pangan mereka.

DAFTAR REFERENSI

- Aulia, A. R. (2024). Penguatan Ketahanan Pangan dan Strategi Penyesuaian Ekonomi Rumah Tangga di Desa Gandarum melalui Diversifikasi Pangan Lokal Menjelang Ramadhan.
- Audi Rahmatika, Dwiyantri, N., & Huda, A. N. (2022). Analisis Dampak Kebijakan Pemerintah dalam Mengatasi Kemiskinan dan Ketimpangan Pangan.
- Dalimunthe, A. R. (2023-2024). Implementation Of Food Security Policy In DKI Jakarta Province (A Case Study Of PT. Food Station Tjipinang Jaya).
- Firdasari, N., & Hardjati, H. (2023). Implementation of Policy of the Food Program in Rural Areas. *Journal La Sociale*, 4(1).
- Husen, P., Palinggi, Y., & Dwijatenaya, I. B. M. A. (2022). Food Security Policy Implementation in Kutai Barat District.
- Indah P. N., & Setyaningsih, A. (2020). Kebijakan Food Security: Arah Kebijakan dan Strategi Ketahanan Pangan Pemerintah Indonesia.
- Jufri, H., Nurlinah, S., & Irwan, A. L. (2024). Local Government and Poverty Alleviation in Baubau City, Indonesia. *Governance Studies Journal*, 9(2).
- Keumala, S. O., Purnomo, E. P., Suswanta, & Akbar, P. (2021). Aceh Provincial Government's Food Security Policy to Facing Covid-19 Pandemic.
- Lukum, R., & Yunus, R. (2023). Implementation of Food Security Policies and Their Implications For Food Availability For Citizens (Boalemo, Gorontalo).
- Meliala, E. S., & Djamaluddin, S. (2024). The Effect of Special Allocation Fund for Agriculture on Food Security in Indonesia.
- Meliala, T., & Djamaluddin, A. (2024). The Effect of Special Allocation Fund for Agriculture on Food Security in Indonesia. *Jurnal Bina Pemerintahan*, 10(2).
- Mohamad Nurpahdi, Rustanto, A. E., & Wicaksana, H. H. (2024). Implementasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang).

JALAN BERLIKU MENUJU STABILITAS PANGAN: ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGENTASAN KEMISKINAN DI TINGKAT LOKAL

- Mustofa, R., Sugiyanto, S., & Susanto, S. (2023). Analysis of the Impact of the Raskin Program on Food Security for Poor Households in Indonesia. *Economia Journal*, 19(1).
- Nugroho, A. A., Sudrajat, A., Azmi, I. F., Ardiansyah, F., & Prasetyanti, R. (2025). Collaborative Governance in Indonesia's Nutritious Food Policy: A Multi-Stakeholder Implementation Model.
- Priambodo, T., & Djirimu, M. (2024). Government Intervention Strategy in Poverty Reduction: Study on the District and City in Indonesia Across 2016-2023. *Jurnal Bina Pemerintahan*, 11(1).
- Rahakbauw, A., & Samputra, D. (2025). Analysis of Food Security Challenges and Strategies in Indonesia. *Agrica Journal*, 12(2).
- Ramdani, D., & Murwiati, A. (2023). Determinants of the Prevalence of Province Food Insufficiency in Indonesia in 2023 with a Quantile Regression Approach. *Sinomics Journal*, 4(3).
- Rianto, B. (2022). The Effectiveness of Social Assistance Food Program on Poverty Reduction in Indonesia. *Journal of Community Innovation*, 3(4).
- Ronalia, N., Hartono, D., & Misdawita, M. (2023). The Impact of Resilience on Household Food Insecurity in Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 21(1).
- Rusli, M., Irmawati, S., Saharuddin, A., & Kamaruddin, H. (2025). Strategy for Regional Poverty Alleviation Based on Food Security in Pohuwato Regency. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Indonesia*, 7(1).
- Rusliyadi. (2024). An Analysis of the Food Security Policy Implementation Framework: The Case of Food Self Sufficiency and Extension Policy in Indonesia. *Asia-Pacific Food Policy Review*.
- Sari, M., & Uwi'ah, M. (2024). Optimalisasi Sumber Daya Lokal dalam Sistem Pertanian Berkelanjutan Untuk Pengentasan Kemiskinan Di Pedesaan.
- Sasana, H., & Muid, D. (2025). The Strategy to Build Food Security and Poverty Alleviation Based on Village Food Resilience. *Rural Economic Perspectives*, 8(1).
- Selvia, F., & Widyastuti, A. E. S. (2024). When Context Matters: A Multi-Level Analysis of Food Security Policy Implementation in Kotawaringin Timur's Sub-district.

- Simanjuntak, J. G. G. P., Monim, O. H., Yubawa, V. K., et al. (2022-2023). Food security policy innovation in Bandung City.
- Simbolon, T., & Shylendra, H. (2022). Enhancing Food Security and Alleviating Poverty: Community Responses to the Poor Rice Program in Jaranguda Village, Indonesia. *Local Empowerment Journal*, 2(2).
- Syaifullah, M., Khusaini, A., & Fadli, M. (2025). Financial Inclusion and Poverty Alleviation in East Java: Evidence From SUSENAS 2023. *Wacana Ekonomi Journal*, 15(1).
- Wahyuni, L., & Shaliza, F. (2022). Evaluasi Kebijakan Program Di Bidang Tanaman Pangan & Hortikultura Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan Pada Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kota Dumai.
- Warsono, B., & Agustina, D. (2024). Implementation of a Poverty and Hunger Free Village as a Realization of the SDGs. *International Journal of Community and Development*, 5(2).
- Yuniar Widya Larasati (2021). Food security policy in Indonesia during the COVID-19 pandemic: A sustainability governance perspective.